

PERDAGANGAN MANUSIA DI PINTU GERBANG NUSANTARA: TANGGUNG JAWAB GEREJA SEBAGAI KOMUNITAS PEMBEBAS

George Rudi Hartono Pasaribu¹, Gomgom Purba², Otieli Harefa³
Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batam^{1,2}, Sekolah Tinggi Teologi Real Batam³
george@st3b.ac.id¹, gomgom@st3b.ac.id², nielharefa@gmail.com³

Abstract

This article explores the reality of human trafficking in the Batam and Riau Islands region, one of Indonesia's primary trafficking hotspots due to its strategic location as a gateway to neighboring countries. Using a qualitative case study approach, this research investigates the awareness and role of local churches in responding to this phenomenon. The findings reveal that many churches remain unaware of the theological connection between faith and social responsibility toward trafficking victims. However, some churches have begun transforming into liberating communities through ministries of restoration and advocacy. This study recommends a transformative diakonia approach and liberation theology as frameworks for the church to act as an agent of social justice in a world marked by oppression.

Keywords: Human Trafficking, Church, Liberating Community, Batam, Liberation Theology, Transformative Diakonia.

Abstrak

Artikel ini membahas realitas perdagangan manusia di wilayah Batam dan Kepulauan Riau, yang merupakan salah satu titik rawan utama di Indonesia karena letaknya yang strategis sebagai pintu gerbang menuju negara-negara tetangga. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini menggali kesadaran dan peran gereja lokal dalam menghadapi fenomena ini. Temuan menunjukkan bahwa sebagian gereja masih kurang menyadari keterkaitan teologis antara iman dan tanggung jawab sosial terhadap korban perdagangan manusia. Namun, terdapat pula gereja yang mulai bertransformasi menjadi komunitas pembebas melalui pelayanan pemulihan dan advokasi. Studi ini merekomendasikan pendekatan diakonia transformatif dan teologi pembebasan sebagai kerangka gereja untuk menjadi agen keadilan sosial di tengah dunia yang tertindas.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Gereja, Komunitas Pembebas, Batam, Teologi Pembebasan, Diakonia Transformatif.

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang terus berkembang dalam berbagai wajah modern, termasuk perbudakan domestik, eksploitasi seksual, dan kerja paksa. Di Indonesia, Batam dan wilayah Kepulauan Riau yang dikenal sebagai pintu gerbang Nusantara menuju Asia Tenggara menjadi salah satu titik rawan yang strategis bagi sindikat perdagangan manusia lintas negara. Letak geografis yang dekat dengan Singapura dan Malaysia menjadikan wilayah ini bukan hanya jalur transit, tetapi juga tujuan praktik perdagangan manusia. (Media Indonesia 2025)

Perdagangan manusia merupakan sebuah kejahatan yang kompleks dan mencakup banyak aspek. Menurut Protokol Palermo yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), praktik ini mencakup seluruh rangkaian tindakan mulai dari merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, hingga menerima seseorang dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Ini bisa melibatkan ancaman, kekerasan fisik, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga memanfaatkan kondisi rentan seseorang. Bahkan, praktik ini juga bisa terjadi melalui pemberian uang atau keuntungan kepada pihak yang memiliki kendali atas korban, semua itu

dilakukan dengan satu tujuan: mengeksploitasi manusia demi keuntungan. (Susi 2023)

Indonesia mengadopsi definisi ini secara resmi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang-undang tersebut, perdagangan manusia dijelaskan sebagai segala bentuk tindakan baik itu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang dilakukan dengan cara kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan dan kondisi rentan. Ini juga termasuk praktik seperti penculikan, penyekapan, atau jeratan utang, bahkan jika dilakukan dengan 'persetujuan' dari orang yang menguasai korban. Perdagangan manusia bisa terjadi di dalam negeri maupun lintas negara, dan pada akhirnya selalu bertujuan untuk mengeksploitasi individu atau membuat mereka hidup dalam situasi yang sangat merugikan secara fisik, mental, dan sosial. (Azzahra and Anim 2023)

Di Indonesia, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. (Roesmijati 2022) Data dari Kepolisian Republik Indonesia mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 3.363 korban TPPO di seluruh Indonesia. (PMK 2024) Angka ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya, di mana jumlah kasus TPPO yang ditangani mencapai 982 perkara, naik 837 perkara atau 557% dari tahun 2022. (Tribatanews.polri.go.id 2023)

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menempati peringkat teratas dalam jumlah kasus TPPO. Sepanjang Januari hingga Juli 2024, Kepri mencatat 140 korban (Indonesia 2024), menjadikannya wilayah dengan jumlah korban terbanyak di Indonesia pada periode tersebut. Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka ini adalah letak geografis Kepri yang strategis sebagai pintu gerbang menuju negara tetangga seperti Malaysia dan

Singapura. Posisi ini menjadikan Kepri sebagai titik transit dan tujuan utama bagi sindikat perdagangan manusia yang memanfaatkan jalur laut dan pelabuhan internasional di wilayah tersebut.

Secara khusus, data dari Polda Kepri mengungkap bahwa sepanjang tahun 2023, telah terjadi 68 kasus TPPO dengan 242 korban yang berhasil diselamatkan, dan 100 tersangka telah ditangkap. Modus operandi yang sering digunakan melibatkan perekrutan korban dengan janji pekerjaan di luar negeri, namun kemudian dieksploitasi dalam berbagai bentuk. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan ini, antara lain melalui pembentukan satuan tugas khusus, peningkatan patroli di jalur-jalur rawan, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan modus operandi TPPO.

Berbagai media nasional dan regional telah menyoroti isu perdagangan manusia di Kepri. Misalnya, Kompas dalam artikelnya "Mandulnya Pemberantasan Perdagangan Orang di Batam" menyoroti tantangan dalam penegakan hukum terhadap sindikat perdagangan manusia di Batam. Sementara itu, (Wiyoga 2024) Batamnews.co.id secara rutin memberitakan kasus-kasus TPPO yang terjadi di wilayah Kepri, menunjukkan betapa seriusnya permasalahan ini. Selain itu, Antara Kepri melaporkan upaya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri dalam mencegah keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang. (ANTARA 2025)

Keresahan terhadap persoalan ini semakin mengemuka dalam berbagai forum gerejawi. Artikel ini terinspirasi dari isi pesan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Kepulauan Riau (PGI-W Kepri) yang berlangsung pada tanggal 25 Maret 2025 di GBKP Runggun Batam Center, Batam. (PGIW

Kepulauan Riau 2025) Dalam pesan tersebut, gereja-gereja diingatkan untuk membuka mata dan hati terhadap penderitaan akibat ketidakadilan struktural, termasuk praktik perdagangan manusia yang mencederai martabat ciptaan Allah. Hal ini menjadi pemicu penting bagi refleksi teologis dan tindakan praksis gereja dalam konteks lokal.

Laporan Komnas Perempuan (2023) dan International Organization for Migration (International Organization for Migration (IOM) Indonesia 2023) Indonesia menunjukkan bahwa banyak korban berasal dari kalangan ekonomi lemah, perempuan, dan anak-anak. Berbagai penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Burhanuddin 2023), menyoroti lemahnya penegakan hukum serta keterbatasan intervensi sosial berbasis komunitas dalam mencegah dan menangani perdagangan manusia. Namun, belum banyak studi yang mengkaji peran gereja sebagai komunitas iman yang aktif dalam pembebasan dan pemulihan korban perdagangan manusia. Di sinilah letak kebaruan dan kontribusi riset ini.

Dalam konteks teologi publik dan diakonia transformatif, gereja tidak hanya dipanggil untuk berdoa dan berkhotbah, tetapi juga bertindak sebagai komunitas pembebas sebagaimana dicontohkan oleh pelayanan Yesus yang memihak kepada kaum tertindas (Lukas 4:18). Oleh karena itu, penelitian ini hendak menjawab beberapa pertanyaan utama:

1. Bagaimana realitas perdagangan manusia di wilayah pintu gerbang Nusantara seperti Batam dan Kepri?
2. Sejauh mana gereja lokal memiliki kesadaran dan keterlibatan dalam isu ini?
3. Bagaimana gereja dapat berperan sebagai komunitas pembebas dalam menghadapi praktik perdagangan manusia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada

komunitas gereja-gereja di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pemimpin gereja, aktivis sosial, dan penyintas perdagangan manusia; observasi partisipatif terhadap program-program gereja yang bersentuhan dengan isu sosial dan kemanusiaan; serta studi dokumentasi atas kebijakan, laporan kegiatan gereja, dan data lembaga sosial terkait. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara semi-terstruktur dan catatan observasi lapangan. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selain itu, studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji perspektif teologi pembebasan (Schilling 1973).

PEMBAHASAN

Realitas Perdagangan Manusia di Batam dan Kepri

Perdagangan manusia merupakan isu serius yang mengancam banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Batam, yang terletak dekat dengan Singapura, situasi ini semakin memprihatinkan. Batam tidak hanya berfungsi sebagai titik transit, tetapi juga sebagai tujuan bagi banyak korban perdagangan manusia, khususnya perempuan muda. Mereka sering kali dijanjikan pekerjaan yang menjanjikan di luar negeri, namun kenyataannya justru berujung pada eksploitasi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami lebih dalam mengenai modus operandi yang digunakan oleh pelaku perdagangan manusia, serta bagaimana masyarakat dan lembaga terkait dapat berperan dalam pencegahan.

Data dari Kapolda Kepulauan Riau menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, Polda Kepri mengungkap 68 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dari jumlah itu 36 kasus berhasil diselesaikan. Sebanyak 100 tersangka berhasil ditangkap dan

dihadapkan pada proses hukum, sementara 242 korban perdagangan manusia berhasil diselamatkan dan diberikan perlindungan. Angka-angka ini mencerminkan betapa seriusnya masalah ini di Batam dan perlunya tindakan yang lebih efektif untuk menanggulangnya. (Sarah Meilina 2025)

Perwakilan Jaringan Safe Migran Batam, RD Chrisantus Paschalis, mengatakan, pada tahun 2024 ini pihaknya terlibat menangani 59 kasus perdagangan orang. Jaringan Safe Migran menampung 88 korban yang tiga di antaranya merupakan anak-anak. (Wiyoga 2024). Salah satu aspek yang paling mencolok dari perdagangan manusia di Batam adalah penggunaan teknologi modern, terutama media sosial. Pelaku sering kali memanfaatkan platform-platform ini untuk menjaring korban. Misalnya, mereka dapat membuat iklan palsu yang menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri. Iklan tersebut sering kali ditujukan kepada perempuan muda yang sedang mencari peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan kata-kata yang menggoda dan gambar-gambar yang menarik, banyak yang terjebak dalam janji-janji manis tersebut. Hal ini menunjukkan betapa canggihnya modus operandi yang digunakan, di mana pelaku tidak hanya mengandalkan cara-cara tradisional, tetapi juga memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjangkau target mereka. (Khotimah 2022)

Selain itu, jaringan agen tenaga kerja ilegal juga berperan besar dalam memperburuk situasi ini. Mereka sering kali beroperasi dalam bayang-bayang, menawarkan layanan yang tampaknya sah tetapi sebenarnya ilegal. Dalam banyak kasus, agen-agen ini menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan biaya yang sangat rendah, tetapi setelah korban membayar, mereka justru dibawa ke tempat-tempat yang tidak aman dan dieksploitasi. Sebagai contoh, beberapa kasus yang pernah terjadi di Batam melibatkan perempuan yang dijanjikan pekerjaan

sebagai pelayan atau tenaga kerja di restoran, tetapi pada kenyataannya mereka dipaksa untuk bekerja di industri seks. Kasus-kasus seperti ini menyoroti betapa rentannya perempuan muda di Batam dan sekitarnya terhadap penipuan semacam ini. (Media Center 2024)

Di sisi lain, peran gereja lokal dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pencegahan perdagangan manusia di Batam masih sangat minim. Meskipun gereja memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan, banyak dari mereka yang belum dilibatkan secara aktif oleh aparat penegak hukum atau LSM dalam upaya pencegahan. Padahal, gereja dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan dan dukungan bagi korban, serta sebagai sarana edukasi untuk masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia. Dengan mengedukasi jemaat mereka tentang tanda-tanda perdagangan manusia dan cara melaporkannya, gereja dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan muda.

Lebih jauh lagi, penting untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari perdagangan manusia di Batam. Perdagangan manusia tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Ketika perempuan muda dieksploitasi, mereka kehilangan kesempatan untuk berkontribusi pada ekonomi lokal. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban perdagangan manusia sering kali membuat mereka sulit untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah mereka berhasil melarikan diri. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan yang sulit untuk diputus.

Dalam konteks yang lebih luas, perdagangan manusia di Batam juga dapat dilihat sebagai bagian dari masalah global yang lebih besar. Indonesia, sebagai negara asal, transit, dan tujuan, berperan dalam jaringan perdagangan manusia internasional. Oleh karena itu, kolaborasi antara

pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menangani masalah ini secara efektif. Misalnya, program-program pelatihan keterampilan bagi perempuan muda dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang sah dan mengurangi kerentanan mereka terhadap penipuan.

Kesadaran Gereja: Antara Kepedulian dan Ketidaktahuan

Dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks, peran gereja sebagai lembaga keagamaan tidak hanya terbatas pada aspek spiritual semata, tetapi juga meluas ke dalam ranah sosial. Banyak gereja saat ini menunjukkan kepedulian terhadap berbagai bentuk penderitaan sosial, mulai dari kemiskinan hingga ketidakadilan. Namun, satu isu yang sering kali terabaikan adalah perdagangan manusia. Meskipun sebagian gereja memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah ini, tidak semua dari mereka menyadari bahwa isu perdagangan manusia merupakan tanggung jawab iman yang harus dihadapi dengan serius.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh gereja adalah kecenderungan untuk terjebak dalam pelayanan yang bersifat ritualistik. Dalam banyak kasus, kegiatan gereja lebih fokus pada pelaksanaan ritual keagamaan dan perayaan liturgi, tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap isu-isu sosial yang mendesak. Misalnya, sebuah gereja mungkin rutin mengadakan kebaktian doa atau perayaan Natal, tetapi jarang sekali melakukan diskusi atau tindakan konkret terkait perdagangan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik, sering kali gereja tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu sosial yang ada di sekitar mereka.

Sebaliknya, terdapat juga gereja-gereja yang telah mengambil langkah proaktif dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban perdagangan manusia.

Misalnya, beberapa gereja di daerah perkotaan telah mendirikan pusat krisis yang menyediakan tempat aman bagi korban yang melarikan diri dari situasi eksploitasi. Dalam pusat ini, korban tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga akses ke layanan kesehatan, konseling psikologis, dan program rehabilitasi. Melalui inisiatif ini, gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang berkomitmen untuk mengatasi masalah perdagangan manusia secara langsung.

Temuan ini sejalan dengan kesadaran gereja dalam menghadapi isu-isu sosial sering kali terbatas pada bentuk bantuan karitatif. Meskipun bantuan ini sangat penting, terutama dalam memberikan dukungan langsung kepada mereka yang membutuhkan, pendekatan ini sering kali tidak cukup untuk mengatasi akar permasalahan yang lebih dalam. Misalnya, jika gereja hanya fokus pada memberikan makanan kepada korban tanpa melakukan upaya untuk mengadvokasi perubahan kebijakan yang dapat mencegah perdagangan manusia, maka mereka mungkin tidak dapat mengubah situasi secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi gereja untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam advokasi struktural.

Analisis mendalam terhadap peran gereja dalam isu perdagangan manusia juga menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan gereja. Salah satunya adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan mengenai isu sosial ini. Banyak pemimpin gereja mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang dinamika perdagangan manusia dan bagaimana cara terbaik untuk membantu korban. Dalam hal ini, program pelatihan dan seminar yang fokus pada isu-isu sosial dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemimpin gereja, mereka

dapat lebih siap untuk mengatasi masalah ini dalam komunitas mereka.

Selain itu, hubungan antara gereja dan masyarakat juga mempengaruhi bagaimana isu perdagangan manusia dipahami dan ditangani. Gereja yang memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas lokal cenderung lebih peka terhadap masalah sosial yang ada. Misalnya, gereja yang terlibat dalam kegiatan komunitas, seperti program pendidikan atau layanan kesehatan, lebih mungkin untuk mendengar dan memahami pengalaman langsung dari individu yang terpengaruh oleh perdagangan manusia. Dengan demikian, gereja dapat berfungsi sebagai jembatan antara korban dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk pemulihan.

Kesadaran gereja terhadap isu perdagangan manusia masih berada dalam tahap yang beragam. Sementara beberapa gereja menunjukkan kepedulian yang mendalam dan mengambil tindakan nyata, banyak yang masih terjebak dalam rutinitas ritualistik yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap masalah sosial. Untuk mengatasi hal ini, gereja perlu mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang tanggung jawab sosial mereka, termasuk advokasi struktural dan pendidikan tentang isu-isu sosial. Dengan langkah-langkah ini, gereja dapat berperan lebih aktif dalam mengatasi perdagangan manusia dan memberikan dukungan yang berarti bagi korban, serta berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang lebih besar dalam masyarakat.

Peran Gereja sebagai Komunitas Pembebas

Dalam konteks modern, gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Melalui pendekatan teologi pembebasan, gereja dipanggil untuk berpihak kepada mereka yang terpinggirkan, melawan ketidakadilan struktural, dan mengadvokasi perubahan sosial yang berkelanjutan. Mikha 6:8 mencatat "Hai manusia, telah

diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?", Ayat ini merupakan dasar utama dari etika profetik Perjanjian Lama yang selaras dengan semangat teologi pembebasan. Menurut *The New Interpreter's Bible Commentary*, Mikha 6:8 menegaskan bahwa spiritualitas sejati harus diwujudkan dalam keadilan sosial. (Abingdon Press 1994) Ini mengarahkan gereja untuk keluar dari zona sakral menuju tindakan nyata bagi dunia yang menderita. Pendekatan ini menuntut gereja untuk tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga pada aspek sosial yang mempengaruhi kehidupan jemaat dan masyarakat luas. Implementasi konkrit dari panggilan ini dapat dilihat dalam beberapa inisiatif yang dapat diambil oleh gereja

Pendekatan ini menuntut gereja untuk tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga pada aspek sosial yang mempengaruhi kehidupan jemaat dan masyarakat luas. Implementasi konkrit dari panggilan ini dapat dilihat dalam beberapa inisiatif yang dapat diambil oleh gereja, antara lain: menjadi tempat perlindungan bagi korban, menjalin kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemerintah, melakukan edukasi jemaat tentang tanda-tanda perdagangan manusia, dan memberdayakan ekonomi keluarga berisiko tinggi.

Menjadi tempat perlindungan bagi korban adalah langkah awal yang sangat penting. Amsal 31:8-9 menulis; "Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang lemah. Bukalah mulutmu, hakimilah dengan adil dan belalah hak orang yang tertindas dan yang miskin." Penjelasan Teologis konteks ini merujuk gereja bertindak sebagai *advocate* atau pembela bagi mereka yang tidak mampu membela diri. *Expositor's Bible Commentary* mencatat bahwa Amsal 31:8-9 (Bible Hub, n.d.) mencerminkan panggilan moral kepada setiap orang beriman untuk memperjuangkan

keadilan melalui keberpihakan kepada yang lemah dan tertindas.

Dalam banyak kasus, individu yang menjadi korban kekerasan, perdagangan manusia, atau penindasan sering kali merasa terasing dan tidak memiliki tempat untuk bernaung. Gereja, dengan segala sumber daya dan jaringan yang dimilikinya, dapat berfungsi sebagai tempat aman di mana korban dapat menemukan dukungan emosional, spiritual, dan fisik. Misalnya, beberapa gereja telah mengembangkan program krisis yang menyediakan tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak-anak yang melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, gereja tidak hanya menawarkan tempat fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan penerimaan, sehingga korban merasa dihargai dan diberdayakan untuk memulai kembali hidup mereka.

Selanjutnya, menjalin kemitraan dengan LSM dan pemerintah merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat upaya gereja dalam mengatasi ketidakadilan sosial. Dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, gereja dapat memperluas jangkauan program-program yang ada dan meningkatkan efektivitasnya. Misalnya, gereja dapat bekerja sama dengan LSM yang fokus pada isu-isu perlindungan anak untuk mengadakan seminar dan lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Selain itu, kemitraan dengan pemerintah lokal dapat membuka akses bagi gereja untuk mendapatkan dukungan dana dan sumber daya lainnya, yang sangat penting dalam menjalankan program-program sosial yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, gereja dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga-lembaga yang memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan.

Injil Matius 5:13-16 mengutip "Kamu adalah garam dunia... Kamu adalah terang dunia." *Craig Keener's Commentary on the Gospel of Matthew*

mengatakan, Yesus memanggil murid-murid-Nya (dan gereja) untuk memengaruhi lingkungan sekitar melalui tindakan nyata—sebagaimana garam yang mengawetkan dan terang yang menerangi. Fungsi gereja bukan hanya liturgis, tetapi juga transformatif dalam kehidupan publik. Menurut Roma 8:19-21 "Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan . . . , bahwa makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan mulia anak-anak Allah." Ayat ini menyiratkan bahwa dunia merindukan kehadiran gereja yang aktif membebaskan, menyembuhkan, dan mengubah keadaan. (Lembaga Alkitab Indonesia 2023)

Dalam upaya untuk memberdayakan jemaat, gereja juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan edukasi tentang tanda-tanda perdagangan manusia. Edukasi ini sangat penting, terutama di komunitas yang rentan terhadap praktik-praktik eksploitasi. Gereja dapat menyelenggarakan seminar, kampanye, atau penyuluhan yang memberikan informasi tentang bagaimana mengenali tanda-tanda perdagangan manusia, serta langkah-langkah yang harus diambil jika seseorang mencurigai adanya praktik tersebut.

Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan jemaat, gereja tidak hanya melindungi individu dari bahaya, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka. Misalnya, ketika seorang jemaat mengetahui bahwa tetangganya mungkin menjadi korban perdagangan manusia, mereka dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang atau LSM yang relevan.

Memberdayakan ekonomi keluarga berisiko tinggi juga merupakan aspek penting dari peran gereja sebagai komunitas pembebas. Banyak keluarga yang terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakadilan berisiko tinggi untuk menjadi korban eksploitasi. Gereja dapat berkontribusi dalam hal ini dengan

menyediakan pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan dukungan dalam menciptakan peluang kerja.

Misalnya, gereja dapat mengembangkan program pelatihan kerja yang mengajarkan keterampilan praktis, seperti menjahit, memasak, atau keterampilan teknis lainnya, yang dapat membantu anggota jemaat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dengan memberdayakan keluarga secara ekonomi, gereja membantu mencegah mereka jatuh ke dalam situasi yang rentan terhadap perdagangan manusia atau kekerasan.

Gereja yang berani memasuki ruang gelap penderitaan akan menjadi terang dan garam, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga sosial. Dalam konteks ini, gereja sebagai ekklesia adalah persekutuan yang “dipanggil keluar” untuk turut serta dalam karya keselamatan dan pembebasan Kristus bagi dunia yang tertindas. Dengan mengambil langkah-langkah konkret dalam mendukung korban, menjalin kemitraan, mendidik jemaat, dan memberdayakan ekonomi, gereja dapat memenuhi panggilannya untuk menjadi agen perubahan yang nyata dan berpengaruh.

Dalam hal ini, gereja sebagai komunitas pembebas memiliki tanggung jawab yang besar untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Melalui berbagai inisiatif yang telah dibahas, gereja dapat berperan aktif dalam melawan ketidakadilan sosial dan memberikan dukungan kepada mereka yang paling membutuhkan.

Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, gereja tidak hanya memenuhi panggilan spiritualnya, tetapi juga menjadi kekuatan yang mengubah wajah masyarakat menuju kebaikan. Dalam perjalanan ini, gereja diharapkan dapat terus menjadi terang dan garam, menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik bagi semua orang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Wilayah pintu gerbang

Nusantara, khususnya Batam dan Kepri, menghadapi tantangan serius terkait perdagangan manusia, yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks. Sebagai titik transit dekat Singapura, Batam menjadi tempat berlangsungnya berbagai jaringan perdagangan manusia. Untuk menghadapi masalah ini, penting bagi gereja sebagai komunitas iman untuk berperan aktif, baik melalui pelayanan pemulihan korban maupun advokasi struktural, yang mencakup pemahaman tentang dinamika sosial dan ekonomi yang mendasari isu tersebut.

Gereja dapat memainkan peran penting dalam pemulihan korban dengan menyediakan dukungan psikologis dan spiritual. Program rehabilitasi yang melibatkan konseling dan pelatihan keterampilan sangat dibutuhkan untuk membantu korban mendapatkan kemandirian ekonomi dan mengatasi trauma. Selain itu, gereja juga perlu aktif dalam advokasi struktural dengan berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Seminar dan lokakarya dapat diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah perdagangan manusia, serta mendorong pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama.

Agar gereja dapat menjalankan peran ini secara efektif, peningkatan kesadaran dan pendidikan teologis yang kontekstual sangatlah penting. Program pendidikan yang mendalam mengenai isu perdagangan manusia dan perspektif teologis dapat membentuk komunitas yang peka terhadap masalah sosial. Kerja sama lintas lembaga juga krusial dalam upaya penanganan perdagangan manusia. Gereja harus menjadi tempat perlindungan dan harapan bagi mereka yang terperangkap dalam situasi tidak manusiawi, mendemonstrasikan kehadiran Kristus di tengah penderitaan umat manusia. Dengan pendekatan holistik, gereja dapat berkontribusi signifikan dalam memerangi

perdagangan manusia dan membantu korban mendapatkan pemulihan yang mereka butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abingdon Press. 1994. *The New Interpreter's Bible*. Vol. 13. Nashville: Nashville : Abingdon Press.
- ANTARA. 2025. "Antara Kepri Melaporkan Upaya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri Dalam Mencegah Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Yang Berpotensi Menjadi Korban Perdagangan Orang." Antara News. 2025. <https://kepri.antarane.ws.com/berita/210994/bp3mi-kepri-cegah-keberangkatan-pmi-korban-perdagangan-orang>.
- Azzahra, Puput, and Fatimah Anim. 2023. "KEPULAUAN RIAU HANDLING OF HUMAN TRAFFICKING CASES IN THE RIAU ISLANDS." *Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Bible Hub. n.d. "Expositor's Bible Commentary." Glassport, PA: BibleHub.com. <https://biblehub.com/commentaries/expositors/proverbs/31.htm>.
- Burhanuddin, Agus salim. 2023. "Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Transnasional Sebagai Ancaman Keamanan Maritim Di Selat Malaka." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1 (4): 101–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1448>.
- Indonesia, CNN. 2024. "698 Orang Jadi Korban TPPO Sepanjang 2024, Kepri & Kaltara Terbanyak." CNN Indonesia. 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240715191300-12-1121586/698-orang-jadi-korban-tpo-sepanjang-2024-kepri-kaltara-terbanyak>.
- International Organization for Migration (IOM) Indonesia. 2023. "Human Trafficking in Indonesia: Trends and Interventions." Jakarta: IOM Indonesia. 2023.
- Khotimah. 2022. "Eksplorasi Tenaga Kerja Perempuan Dalam Kasus Human Trafficking." *Mubadalah.Id*, September 1, 2022. <https://mubadalah.id/eksplorasi-tenaga-kerja-perempuan-dalam-kasus-human-trafficking/>.
- Lembaga Alkitab Indonesia. 2023. *Alkitab Terjemahan Baru Edisi 2*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Media Center. 2024. "Pemko Batam Berkomitmen Mendukung Upaya Perangi TPPO." *Diskominfo Batam*, 2024. <https://mediacenter.batam.go.id/2024/10/25/PEMKO-BATAM-BERKOM/>.
- Media Indonesia. 2025. "Polda NTT Tangkap Tiga Tersangka Perdagangan Orang Di Batam." Metro TV. 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/N4EC4mm0-polda-ntt-tangkap-tiga-tersangka-perdagangan-orang-di-batam>.
- PGIW Kepulauan Riau. 2025. "PESAN SIDANG MPL-IV PGI-W KEPRI GBKP RUNGGUN BATAM CENTER, 25 MARET 2025 Salam." Batam.
- PMK, KEMENKO. 2024. "Penguatan Data Dan Inovasi Dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)." KEMENKO PMK. 2024. <https://www.kemenkopmk.go.id/penguatan-data-dan-inovasi-dalam-penanganan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpo>.
- Roesmijati, R. 2022. "Teologi Pembebasan Dalam Human Trafficking Ditinjau Dari Manusia Sebagai Gambar Allah Dan Sila Kedua Pancasila.: Liberation Theology in Human Trafficking" *Kingdom 2* (2): 137–47. <http://www.ojs.sttkingdom.ac.id/index.php/Theo/article/view/55>.
- Sarah Meilina. 2025. "Polda Kepri Ungkap 68 Kasus TPPO, Selamatkan 242 Korban." *Rri.Co.Id*, 2025.

- <https://rri.co.id/daerah/1231999/polda-kepri-ungkap-68-kasus-tpo-selamatkan-242-korban>.
- Schilling, S. Paul. 1973. *A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation by Gustavo Gutiérrez. The Thomist: A Speculative Quarterly Review*. The Thomis. Vol. 37. Johns Hopkins University Press:
<https://doi.org/10.1353/tho.1973.0042>.
- Susi, Susi. 2023. "Perdagangan Manusia (Human Trafficking)." PID. Kepri. Polri. Go. Id. 2023.
<https://pid.kepri.polri.go.id/perdagangan-manusia-human-trafficking/>.
- Tribrataneews.polri.go.id. 2023. "Kapolri Catat Ada 982 Kasus TPPO Di Sepanjang 2023." Tribrataneews.Polri.Go.Id. 2023.
<https://tribrataneews.sulut.polri.go.id/kapolri-catat-ada-982-kasus-tpo-di-sepanjang-2023/>.
- Wiyoga, Pandu. 2024. "Mandulnya Pemberantasan Perdagangan Orang Di Batam." KOMPAS. 2024.
<https://www.kompas.id/artikel/mandulnya-pemberantasan-perdagangan-orang-di-batam>.